

Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui BUMK di Kampung Gosong Telaga Selatan, Aceh Singkil

Economic Improvement of the Community through BUMK in Gosong Telaga Selatan Village, Aceh Singkil

*Afrizal Tjoetra¹, Samwil², Adam Sani³, Aduwina⁴, Saiful Asra⁵

¹⁻⁵Universita Teuku Umar, Meulaboh

*email: afrizaltjoetra@utu.ac.id

Abstract

Coastal communities are frequently associated with various limitations, making them synonymous with poverty despite having significant social capital to effect change through their potential. As a coastal community, the GosongTelaga Selatan community has tried to develop its potential by developing mangrove tourism through BUMK (village-owned enterprises). This article aims to describe the community's efforts and the factors that influence the community's economy through BUMK Bina Lestari. This study used a qualitative method with a descriptive approach, with data obtained through observation and interviews. This study showed that the community and government's efforts to boost the community's economy through BUMK had no significant impact. The reason is that the choice of BUMK policies, which focus on establishing ecotourism, has not been well planned. The supporting factors for the choice of BUMK policies in developing ecotourism are the availability of abundant mangrove forests, panoramic beauty, and an open community culture accepting various people visiting tourist sites. At the same time, the factors inhibiting the success of these efforts are the lack of facilities and infrastructure, the lack of local production, and the lack of publications and promotions.

Keywords: *Masyarakat Pesisir, Wisata Mangrove, BUMK, Ekonomi*

Abstrak

Masyarakat pesisir seringkali diasosiasikan dengan berbagai keterbatasan dan kemiskinan meskipun mereka memiliki modal sosial dan potensi yang signifikan untuk berubah. Masyarakat Gosong Telaga Selatan sebagai masyarakat pesisir telah berusaha mengembangkan potensi wisata Mangrove yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Kampung. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui BUMK Bina Lestari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kajian ini menunjukkan bahwa upaya masyarakat dan pemerintah untuk mendorong perekonomian masyarakat melalui BUMK belum memberikan dampak yang signifikan. Pasalnya, pilihan kebijakan BUMK yang fokus membangun ekowisata belum terencana dengan baik. Faktor pendukung pilihan kebijakan BUMK dalam mengembangkan ekowisata adalah tersedianya hutan Mangrove yang melimpah, keindahan panorama, dan budaya masyarakat yang terbuka menerima berbagai kalangan yang berkunjung ke lokasi wisata. Sementara itu, faktor penghambat keberhasilan upaya tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya produksi lokal, serta kurangnya publikasi dan promosi.

Kata Kunci: *Coastal Communities, Mangrove Tourism, BUMK, Economy*

A. Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggir telah menjadi perspektif pembangunan masa kini (Suarezsaga, Wisnubadhra, and Purnomo 2014). Hal ini cukup beralasan karena dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu isi dari sembilan program Nawacita Presiden dan Wakil Presiden Indonesia (Hastangka 2020). Menurut Zulkhakim dan Harmiati (2017:1) ini menjadi salah satu bentuk kebijakan pembangunan yang strategis karena dapat menguatkan wilayah pedesaan sebagai salah satu tonggak kedaulatan nasional agar dapat berkompetensi secara global. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin masih didominasi oleh masyarakat pedesaan sehingga membangun Indonesia dari desa adalah pilihan kebijakan yang tepat. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak hingga membuat kawasan pedesaan dipandang identik dengan kata “kemiskinan”(Retrianto, Wisadirana, and Kholifah 2016; Rosyadi 2017; Yacoub and Mutiaradina 2020). Pandangan tersebut tentunya cukup beralasan karena penduduk Indonesia sebagian besar memang tinggal di pedesaan. Pada umumnya mereka hidup dalam keterbatasan, kemiskinan dan tidak berdaya dalam menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan yang terjadi. Selain disebabkan oleh masalah ekonomi, kondisi itu juga sering kali disebabkan oleh kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan, termasuk informasi (Kusumaningrat 2009)

Manifestasi dari kebijakan Indonesia dari pinggir memang benar-benar terasa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut definisi desa bersifat lebih terbuka dan dapat mengandung unsur lokalitas. Definisi desa yang dimaksud yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Selain aspek lokalitas yang juga dipertimbangkan, definisi tersebut juga menuntut desa untuk melakukan berbagai upaya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa dituntut untuk melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia,

sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya (Anggraeni 2016).

Salah satu kebijakan yang dinilai dapat menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan dengan paradigma membangun Indonesia dari pinggir adalah membentuk badan usaha milik desa. Badan usaha ini merupakan wadah bagi masyarakat desa untuk mengembangkan segala potensi desa yang ada agar berpengaruh pada perekonomian masyarakat. Tentunya kebijakan pendirian badan usaha tersebut telah didukung penuh oleh pemerintah pusat melalui undang-undang desa beserta turunannya. Tidak mengherankan kemudian jika pada setiap desa yang ada di Indonesia telah berdiri satu lembaga usaha milik desa yang dapat digunakan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Tidak berhenti di situ, pemerintah juga memberikan dana untuk keperluan operasional lembaga usaha tersebut agar dapat beroperasi dengan baik. Secara kelembagaan, kepemilikan badan usaha tersebut adalah milik desa dan dikontrol bersama oleh masyarakat. Tujuan utama pembentukannya adalah untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Bentuk nyata dari lembaga usaha ini adalah Badan Usaha Milik Desa atau yang lebih dikenal dengan BUMDes.

Secara teoritis BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di gampong berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (Saputra 2019). Secara normatif BUMDes sebagai badan hukum dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat. Pendirian BUMDes seperti yang tercantum dalam UU Desa merupakan salah satu upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengaturan pembentukan BUMDes dapat dilihat dalam Pasal 87 ayat (1) yang mengatur bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes, ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Tujuan pendirian BUMDes tersebut adalah sebagai usaha desa yang dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat dari program proyek pemerintah dan pemerintah daerah. Pendirian BUMDes merupakan perwujudan

dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, serta berkelanjutan.

Di Aceh, terdapat beberapa kekhususan terkait dengan implementasi undang-undang desa yang membuka ruang bagi kearifan lokal menjadi bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekhususan Aceh dalam hal pengaturan wilayah terkecil sehingga penyebutan desa menjadi tidak digunakan, tetapi diganti dengan kearifan lokal yaitu gampong/kampung atau nama lainnya. Jadi hampir semua desa di Aceh memiliki penyebutannya sendiri, dan pada umumnya desa disebut dengan “gampong” sehingga badan usahanya disebut dengan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong). Badan usaha ini juga merupakan manifestasi dari cara pandang pembangunan dari pedesaan sehingga hampir semua gampong di Aceh telah berdiri BUMG. Perbedaan nama ini berdasarkan kekhususan yang dimiliki oleh Aceh yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Perbedaan dilandaskan pada perbedaan nama sebutan desa menjadi nama gampong di Aceh. Dasar hukum penggunaan gampong di Aceh yaitu Pasal 1 ayat (20) UUPA yang menetapkan bahwa “ Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.

Dalam konteks Indonesia secara umum, perkembangan BUMDes telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian masyarakat, demikian pula dengan konteks Aceh di mana BUMG juga turut memberikan pengaruh pada dinamika perekonomian masyarakat pedesaan. Peran yang dimaksud tidak selalu bermakna positif, tetapi juga terkadang bermakna negatif. Tapi tentunya BUMG di Aceh atau BUMDes di Indonesia diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat, dan hal ini dapat terealisasi apabila dikelola dengan baik. Sayangnya, jumlah BUMG di Aceh yang begitu banyak belum berbanding lurus dengan peningkatan perekonomian masyarakat. Masalahnya adalah masih banyak gampong/kampung yang belum mampu memanfaatkan BUMG secara maksimal sehingga berpengaruh pada lambannya peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk konteks Aceh misalnya belum banyak pemberitaan yang menunjukkan bahwa BUMG benar-benar memberikan efek signifikan pada perekonomian masyarakat.

Sehubungan dengan itu, salah satu gampong/kampung di Aceh yang juga memiliki BUMG dan juga masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah yaitu

Kampung Gosong Telaga Selatan yang terletak di Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Secara kelembagaan, BUMG di Kampung Gosong Telaga Selatan memiliki sebutan yang berbeda. Jika secara nasional disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan di Aceh pada umumnya disebut dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), namun di Gosong Telaga Selatan disebut dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Masyarakat Gosong Telaga Selatan ini sebagian besar memiliki profesi sebagai nelayan. Di satu sisi, masyarakat nelayan saat ini mengalami tantangan ekonomi karena harga ikan yang murah, hasil tangkapan nelayan yang minim karena perlengkapan alat tangkap yang dimiliki nelayan masih tradisional dan sederhana, serta adanya penggunaan alat tangkap yang lebih canggih oleh nelayan luar daerah, seperti pukot harimau sehingga berdampak pada jumlah tangkapan ikan nelayan. Di sisi lain, di kampung ini terdapat BUMK yang diberi nama BUMK Bina Lestari di Kampung Gosong Telaga Selatan. Dari sisi potensi, BUMK ini sebenarnya berpotensi untuk menjadi wadah dan pendorong peningkatan ekonomi masyarakat karena Aceh Singkil secara umum dan Kampung Gosong Telaga Selatan memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi. Maka keberadaan BUMK dengan alokasi dana desa yang ada dapat diarahkan untuk promosi pariwisata daerah ini sebagaimana yang pernah terjadi di kawasan Burtelege Aceh Tengah (Adlin 2022; Kamil et al. 2021). Masyarakat Gosong Telaga Selatan bersama BUMK telah berupaya mengembangkan usaha masyarakat nelayan melalui sektor pariwisata, seperti pengelolaan hutan Mangrove, warung prasmanan, serta simpan pinjam untuk mendukung usaha dagang dan jasa dalam masyarakat Kampung Gosong Telaga Selatan. Namun sayangnya hal tersebut belum mampu dilakukan dengan baik sehingga keberadaan BUMK belum secara signifikan berhasil mendorong perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kajian ini akan mendeskripsikan tentang usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dan pemerintah Kampung Gosong Telaga Selatan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMK Bina Lestari.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Gosong Telaga Selatan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati perilaku sosial masyarakat yang berkaitan dengan pemanfaatan BUMK dalam mendorong peningkatan perekonomian

masyarakat. Selain itu penulis juga melakukan observasi bagaimana masyarakat memanfaatkan dan mengelola potensi pariwisata yang ada di daerah ini. Kemudian peneliti melakukan wawancara kepada beberapa pihak seperti Keuchik (Kepala Desa), pengelola BUMK dan beberapa masyarakat Kampung Gosong Telaga Selatan. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui aspek-aspek yang terkait dengan pemanfaatan BUMK untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara tersebut kemudian penulis analisis secara interaktif sebagaimana yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (Ridder et al. 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Potret Singkat Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Gosong Telaga Selatan Kecamatan Singkil Utara Kabupaten Aceh Singkil. Gampong ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa Kampung Gosong Telaga Selatan memiliki hutan Mangrove yang dikembangkan menjadi objek wisata melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Sebelum berdiri sendiri sebagai desa otonom, Gosong Telaga Selatan merupakan bagian dari Gosong Telaga. Pemekaran Gampong Gosong Telaga dilakukan pada tahun 1970-an menjadi dua desa, yaitu Desa Gosong Telaga Utara dan Desa Gosong Telaga Selatan. Dua desa ini dilingkupi oleh satu kemukiman yang diberi nama Kemukiman Gosong Telaga. Pada tahun 1972 bahwa Gosong Telaga pernah mendapatkan anugerah penghargaan dari pemerintah sebagai pemukiman teladan di Aceh karena kerukunan, keamanan, kebersihan serta keindahan. Meskipun menjadi salah satu desa yang pernah mendapat anugerah penghargaan dari pemerintah, namun sampai saat ini pembangunan infrastruktur di kawasan Gosong Telaga khususnya Gosong Telaga Selatan masih belum memadai terutama fasilitas jalan menuju tempat wisata dan kondisi sosial masyarakat masih tergolong miskin dan tingkat pendidikan masih relatif rendah (Jaya 2019).

Gosong Telaga Selatan terletak di daerah pesisir pantai Singkil memiliki luas 13100 ha dan panjang 131 Km dengan jarak sekitar 20 Km dari Kota Singkil. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kampung Gosong Telaga Selatan sebesar 961 Jiwa dengan rincian 490 laki-laki dan 471 Perempuan (BPS, 2022). Kondisi sosial Gosong Telaga Selatan termasuk masyarakat heterogen yang terdiri dari suku Minang, Singkil Hulu,

Batak, dan Nias. Secara umum penghasilan masyarakat bersumber dari hasil laut yang dikelola secara tradisional baik dari sistem penangkapan maupun dalam proses pengolahan (ikan asin). Kegiatan melaut merupakan aktivitas utama masyarakat Gosong Telaga Selatan, sedangkan aktivitas lainnya merupakan aktivitas sekunder bagi masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena secara Geografis gampong ini memang terletak di daerah pesisir.

2. BUMK dan Usaha Peningkatan Perekonomian Masyarakat

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Azizah 2017). Di Aceh, kehadiran BUMG juga tidak terlepas dari Permendesa Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMG. Tujuan pembentukan BUMG sebagaimana tercantum dalam Permendesa adalah untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Dengan adanya BUMG ini diharapkan bisa melahirkan industri-industri kreatif yang mampu memberdayakan masyarakat desa hingga tidak lagi ada masyarakat pedesaan yang merantau ke kota hanya untuk mencari pekerjaan (Zulfadhli and Khairulyadi 2021). BUMK di Gosong Telaga Selatan ini telah berdiri sejak tahun 2018, dan menjalankan program bidang objek wisata Mangrove sejak 2020 lalu.

Dalam konteks peningkatan perekonomian masyarakat, BUMK menerapkan strategi jangka panjang, yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam setempat berupa hutan Mangrove menjadi objek wisata. Keuchik Kampung Gosong Telaga Selatan menyampaikan:

“Kami disini memiliki hutan bakau... kemudian kami mencoba mengelola hutan tersebut menjadi ekowisata Mangrove yang digerakkan oleh para pemuda yang selanjutnya melalui objek wisata tersebut bisa menjadi sumber pendapatan desa dan masyarakat khususnya para pemuda (Wawancara, 2022).”

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Urusan Pembangunan Kampung Gosong Telaga Selatan:

“Melalui Badan Usaha Milik Kampung kami sebagai aparat desa dan bersama para pemuda berinisiatif untuk memberdayakan hutan bakau untuk menjadi salah

satu objek wisata yang bisa membuka lapangan kerja bagi para pemuda khususnya dan bagi warga pada umumnya (Wawancara Syafrizal, 2022)”

Kedua kutipan wawancara tersebut di atas menginformasikan bahwa aparaturnya dan warga Kampung Gosong Telaga Selatan memiliki strategi kreatif dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMK dengan memanfaatkan kekayaan alam yang dimiliki kampung setempat. Tentu saja upaya dan strategi yang dilakukan sangat visioner dan bagus untuk terus dikembangkan dengan perencanaan yang tepat.

BUMK di Kampung Gosong Telaga Selatan selain mengembangkan sektor wisata Mangrove juga memiliki upaya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat, yaitu melalui pelatihan yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Aceh Singkil. Masyarakat diberikan pelatihan dan seminar tentang manajemen pengolahan objek wisata. Salah seorang informan yang merupakan pengurus BUMK Bina Lestari mengungkapkan:

“Jika ada dibuat pelatihan oleh Dinas Pariwisata maka kami selalu mengirimkan utusan perwakilan para pemuda dan aparaturnya kampung, serta pengurus BUMK Bina Lestari untuk mengikuti pelatihan tersebut sehingga ilmu yang didapat bisa dijadikan dasar pengembangan wisata Mangrove yang ada disini. (Wawancara, 2022)

Senada dengan itu, salah seorang pemuda Kampung Gosong Telaga mengungkapkan:

Saya dan beberapa kawan yang lain sudah beberapa kali mengikuti pelatihan pada Dinas Pariwisata Aceh Singkil. Saya merasakan banyak ilmu yang saya dapat dan bisa saya bagikan kepada kawan-kawan yang lain. (Wawancara Darwis, 2022)

Meskipun BUMK bersama Pemerintah Kampung dan masyarakat telah mengupayakan untuk menjadikan hutan Mangrove sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, tetapi hal itu tidak serta merta membuahkan hasil. Karena pilihan strategi pengembangan wisata tersebut sebenarnya merupakan strategi jangka panjang dan memerlukan dukungan oleh semua pihak. Bukan hanya oleh masyarakat Kampung Gosong Telaga Selatan, tetapi juga oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Selain itu, dukungan yang tidak kalah penting juga adalah dukungan pendanaan. Dukungan pendanaan sangat penting karena berkaitan dengan menciptakan daya tarik dan promosi karena pendanaan BUMK tidak akan cukup jika hanya mengandalkan dari alokasi dana Kampung Gosong Telaga Selatan.

Secara garis besar dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat melalui BUMK Bina Lestari masih belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Saat ini

nilai ekonomi yang dihasilkan dari program BUMK tersebut masih minim dan hanya cukup untuk keperluan operasional. Keuchik Kampung Gosong Telaga Selatan menyampaikan:

“Hasil dari pendapatan wisata Mangrove hanya cukup untuk biaya operasional para pekerja dan biaya rehab fasilitas yang diperlukan. Lagi pula pengunjungnya bersifat musiman tidak setiap hari ada... (Wawancara, 2022).

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Setiap upaya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat selalu saja memiliki faktor pendukung dan penghambat. Hal ini juga dialami oleh BUMK yang terdapat di Kampung Gosong Telaga Selatan. Meskipun secara geografis Kampung Gosong Telaga termasuk wilayah pesisir yang memiliki panorama alam yang sangat indah, namun disisi lain sumber daya manusia masih sangat terbatas dalam mengembangkan usaha kreatif bidang kepariwisataan sehingga dampak dari program BUMK terhadap pengentasan kemiskinan belum memberikan hasil yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, keindahan panorama yang ada di kawasan wisata yang dikembangkan ini sebenarnya menjadi faktor pendukung bagi kesuksesan BUMK. Tetapi kembali lagi pada dua aspek penting yang perlu dipersiapkan dengan baik, yaitu sumber daya manusia dan kemampuan pengelola untuk menjalin berbagai kerja sama agar mereka mendapatkan dukungan pendanaan dan promosi yang besar. Jika ini dapat terjadi maka usaha BUMK mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui ekowisata Mangrove dapat lebih mudah terealisasi.

Dalam pandangan beberapa informan, program pengembangan ekowisata Mangrove yang dijalankan BUMK Bina Lestari di Kampung Gosong Telaga Selatan mempunyai beberapa faktor pendukung utama, yaitu memiliki hutan bakau yang bagus untuk dikembangkan seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kampung Gosong Telaga Selatan:

Disini sebenarnya banyak sekali lahan hutan bakau yang bisa dikembangkan untuk objek wisata, bapak bisa lihat di sepanjang garis pantai itu....jika dikelola dengan baik ini sangat menguntungkan masyarakat kampung kami... (Wawancara Suherlin, 2022)

Selain faktor alam, program pengembangan ekowisata Mangrove di Kampung Gosong Telaga Selatan juga didukung oleh faktor budaya. Masyarakatnya sangat heterogen dan terbuka terhadap orang asing, mereka juga memiliki aturan yang baik dalam menjaga

ketertiban tempat wisata sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat:

Masyarakat kami sangat senang jika ada pengunjung bahkan mereka sangat ramah dalam melayani para pengunjung tanpa melihat dari mana mereka datang... Untuk menjaga ketertiban disini ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun seperti tidak diperbolehkan membawa minuman keras, mengganggu hewan yang ada di tempat wisata.. (Wawancara Anhari, 2022)

Dalam pandangan masyarakat, potensi alam yang berupa hutan Mangrove merupakan faktor penunjang utama dalam pengembangan wisata di tempat ini, termasuk pula heterogenitas sosial masyarakatnya. Hal tersebut tentu tidak dapat dipungkiri, namun pada potensi-potensi tersebut tidak cukup kuat apabila tidak didukung dengan faktor-faktor lainnya.

Faktor penghambat yang dirasakan oleh masyarakat dalam upaya pengembangan usaha BUMK Bina Lestari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terdiri sebagai berikut:

- 1) Minimnya sarana dan prasarana. Hal ini dapat diketahui dari kondisi lokasi wisata yang belum didukung dengan fasilitas jalan yang memadai, fasilitas MCK yang kurang layak, penunjuk lokasi yang minim, serta dukungan mode transportasi yang diperlukan menuju lokasi wisata.
- 2) Minimnya hasil produksi lokal di lokasi wisata. Jenis produksi lokal merupakan salah satu daya tarik para pengunjung di lokasi wisata, misalnya kerajinan tangan serta sajian kuliner khas daerah setempat. Produksi lokal yang banyak dijumpai pengunjung di lokasi wisata hanya kelapa muda. Sedangkan kios atau toko di kawasan wisata hanya menyediakan makanan ringan produksi luar daerah.
- 3) Minimnya publikasi dan promosi. Informasi tentang wisata Mangrove di Gosong Telaga Selatan masih sangat minim. Informasi yang dapat diakses dominan dalam bentuk berita, namun belum didukung dengan informasi yang detail terkait dengan lokasi wisata Mangrove di Kampung Gosong Telaga Selatan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa upaya yang telah dilakukan masyarakat Kampung Gosong Telaga Selatan untuk mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui BUMK Bina Lestari belum memberikan dampak yang signifikan dan belum terbilang sukses. Penyebabnya karena

pilihan kebijakan BUMK yang berfokus pada pembentukan ekowisata belum terprogram dengan baik. Usaha BUMK tersebut belum dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Gosong Telaga Selatan karena nilai ekonomi yang diperoleh hanya cukup untuk keperluan operasional. Faktor pendukung utama usaha BUMK Bina Lestari dalam mengembangkan ekowisata merupakan ketersediaan hutan Mangrove yang melimpah, keindahan panorama dan budaya masyarakat yang terbuka dalam menerima berbagai masyarakat yang berkunjung ke lokasi wisata. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu minimnya sarana dan prasarana, minimnya produksi lokal, serta minimnya publikasi.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat-Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP) Universitas Teuku Umar (UTU) yang telah mendanai penelitian ini dengan nomor kontrak: 158/UN59.7/SPK-PPK/2022.

Daftar Pustaka

- Adlin, Nur Wulan. 2022. "Pengembangan Wisata Alam Bur Telege." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 3(1):38–54. doi: 10.22373/jsai.v3i1.1586.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEDESAAN STUDI PADA BUMDES DI GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA." *MODUS* 28(2). doi: 10.24002/modus.v28i2.848.
- Azizah, Rizka. 2017. "Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah* 10(2):1–94.
- BPS. 2022. *Kabupaten Aceh Singkil Dalam Angka 2022*. Aceh: Badan Pusat Statistik Aceh Singkil.
- Hastangka, Hastangka. 2020. "Doktrin Filsafat Politik Jokowi Dan Janji Nawacita (Mengurai Gagasan Revolusi Mental)." *Jurnal Pancasila* 1(2):39–44.
- Jaya, Sadri Ondang. 2019. "Gosong Telaga, Desa Teladan Di Aceh." *Serambinews.Com*. Retrieved December 1, 2022 (<https://aceh.tribunnews.com/2019/07/20/gosong-telaga-desa-teladan-di-aceh>).
- Kamil, Ade Ikhsan, Iromi Ilham, Siti Ikramatoun, Richa Meliza, and Sjaffruddin

- Sjaffruddin. 2021. "BUR TELEGE : ETNOGRAFI GERAKAN KOLEKTIF MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN WISATA ISLAM." *Aceh Anthropological Journal* 5(2):118. doi: 10.29103/aaj.v5i2.5650.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2009. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Retrianto, D. H., D. Wisadirana, and Siti Kholifah. 2016. "Peran Koperasi Wanita Dalam Menanggulangi Kemiskinan Pada Perempuan Di Pedesaan (Studi Kasus Pada Kopwan Kencana Desa Dongko Kecamatan Dongko" *Wacana Journal of Social* ... 19(4):253–62.
- Ridder, Hans Gerd, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook*. Vol. 28.
- Rosyadi, Imron. 2017. "Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Pedesaan Dalam Perspektif Struktural." Pp. 499–512 in *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Saputra, Romi. 2019. "Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Implementasi Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Jalancagak Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat." *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan* 15–31. doi: 10.33701/jt.v9i1.607.
- Suarezsaga, Fredrikus, Irya Wisnubadhra, and Y. Sigit Purnomo. 2014. "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Desa Dan Kawasan Perdesaan Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM." *PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU&CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI_U) Kajian Multi Disiplin Ilmu Untuk Mewujudkan Poros Maritim Dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat* (43):978–79.
- Yacoub, Yarlina, and Hana Mutiaradina. 2020. "Analisis Kesejahteraan Petani Dan Kemiskinan Perdesaan Di Indonesia." Pp. 92–102 in *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*.
- Zulfadhli, and Khairulyadi. 2021. "Modal Sosial Dalam Pengelolaan BUMG Di Gampong Trieng Gadeng Aceh Timur." *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)* 2(2):60–74. doi: 10.22373/jsai.v2i2.1452.
- Zulhakim, Aziz, and Harmiati. 2017. "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa." *Academia* 1–14.